



Praktik Kurikulum Merdeka Dan Implikasinya Terhadap Biaya Pendidikan: Perspektif Kepala Sekolah, Guru, dan Wali Murid SD Tulus Bakti Palembang

Julia Nofiani¹, Arliani Saputri², Aisa³, Abdurrahmansyah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: jnofiani@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 12, 2025

Revised July 20, 2025

Accepted October 30, 2025

Available online November 02, 2025

Kata Kunci:

Kurikulum Merdeka, biaya pendidikan, kepala sekolah, guru, wali murid

Keywords:

Independent Curriculum, educational expenses, principal, teacher, parent.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mengulas penerapan Kurikulum Merdeka serta dampaknya terhadap biaya pendidikan di SD Tulus Bakti Palembang dengan menitikberatkan pada pandangan kepala sekolah, guru, dan orang tua murid. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan dinamika pelaksanaan kurikulum, strategi penyesuaian sekolah, serta konsekuensi finansial yang timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memandang Kurikulum Merdeka sebagai ruang untuk memperluas inovasi pembelajaran, meskipun menuntut penataan ulang anggaran dan tata kelola sekolah. Guru menilai pembelajaran menjadi lebih kreatif dan relevan dengan kehidupan nyata, tetapi membutuhkan biaya tambahan untuk penyediaan media, fasilitas, serta pelatihan profesional. Sementara itu, orang tua menyoroti adanya beban baru terkait penyediaan bahan praktik dan kegiatan berbasis proyek, walaupun tetap mengakui manfaatnya dalam membentuk kemandirian dan keterampilan anak. Secara keseluruhan, penerapan Kurikulum Merdeka memberikan kontribusi positif terhadap mutu pendidikan, namun di sisi lain memunculkan

konsekuensi biaya yang cukup besar sehingga dibutuhkan kolaborasi erat antara pihak sekolah dan orang tua demi menjamin keberlanjutannya.

ABSTRACT

This study explores the implementation of the Independent Curriculum (Kurikulum Merdeka) and its impact on educational expenses at SD Tulus Bakti Palembang, focusing on the perspectives of the principal, teachers, and parents. A qualitative approach was employed, using in-depth interviews as the main data collection method, while the findings were analyzed descriptively to capture how the curriculum is applied, how schools adapt, and the financial consequences that arise. The results reveal that the principal views the Independent Curriculum as an opportunity to broaden innovation in teaching, though it requires adjustments in budgeting and school management. Teachers perceive learning as more creative and contextual but note the additional costs needed for teaching media, facilities, and training. Parents emphasize new financial demands related to project-based learning and practice materials, yet they acknowledge the benefits for their children's independence and skills development. Overall, the Independent Curriculum contributes positively to the quality of education but also brings considerable financial challenges, making collaboration between schools and parents essential for sustainable implementation.

1. PENDAHULUAN

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan yang resmi dijalankan pemerintah Indonesia sejak tahun 2022. Kebijakan ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan sistem pendidikan yang lebih luwes, berpusat pada peserta didik, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kurikulum Merdeka menempatkan kurikulum sebagai seperangkat rencana sekaligus pengelolaan pembelajaran yang menuntut adanya kemandirian dari sekolah maupun guru agar proses belajar sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik.

Abdurrahmansyah, Amin, dan Fauzi (2024) menegaskan bahwa nilai-nilai pendidikan, termasuk moderasi beragama, seringkali diinternalisasikan melalui *hidden curriculum*. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak hanya bertumpu pada aspek formal, tetapi juga pada penanaman nilai yang tercermin dalam interaksi sehari-hari di sekolah. Sejalan dengan itu, Lewis, Khotima, Abdurrahmansyah, dan Handayani (2024) menambahkan bahwa kurikulum, khususnya di lembaga pendidikan Islam, perlu memiliki relevansi sosial serta mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal pembiayaan.

Penelitian Yusa dkk. (2023) menemukan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sejumlah sekolah di Indonesia masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sarana fisik, infrastruktur, serta pelatihan guru yang belum merata. Di sisi lain, kurikulum ini justru membuka peluang bagi pembelajaran yang lebih kontekstual, lintas disiplin, dan mendukung pemerataan pendidikan yang inklusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengkaji praktik implementasi Kurikulum Merdeka di SD Tulus Bakti Palembang serta implikasinya terhadap biaya pendidikan dari tiga sudut pandang utama: kepala sekolah, guru, dan wali murid. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan analisis deskriptif, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai tantangan, strategi penyesuaian, serta konsekuensi finansial yang timbul dalam praktik di lapangan.

Kajian Pustaka

Secara umum, kurikulum dipahami sebagai rancangan pendidikan yang menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Abdurrahmansyah (2024) menekankan bahwa pengembangan kurikulum tidak boleh hanya terpaku pada susunan mata pelajaran, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, kondisi sosial budaya, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang memberi ruang fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai konteks lokal. Namun, kebebasan tersebut menuntut kesiapan lembaga pendidikan, baik dari segi pengelolaan, pendanaan, maupun strategi pembelajaran.

Hasil penelitian Marwah dkk. (2022) menunjukkan bahwa meskipun mayoritas orang tua mendukung kebijakan ini, mereka tetap merasakan adanya biaya tersembunyi, misalnya kebutuhan tambahan untuk bahan praktik maupun kegiatan berbasis proyek. Dari sisi teori, konstruktivisme yang menjadi dasar filosofis Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses belajar siswa (Sari, 2022). Akan tetapi, penerapan pendekatan ini tidak lepas dari tuntutan penyediaan media, sumber belajar, dan fasilitas yang menimbulkan konsekuensi finansial.

Diva dkk. (2025) juga menyoroti pentingnya sertifikasi dan profesionalisme guru sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi kurikulum baru. Meski demikian, faktor tersebut masih sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan kesiapan lembaga. Di sisi lain, penelitian Amirudin (2023) menegaskan bahwa kepemimpinan berperan penting dalam menentukan arah, kesiapan, serta respons institusi pendidikan terhadap kebijakan kurikulum. Selaras dengan itu, Lewis, Khotima, Abdurrahmansyah, dan Handayani (2024) berpendapat bahwa perguruan tinggi Islam juga memerlukan adaptasi kurikulum yang sesuai dengan tuntutan lokal maupun global, termasuk dalam hal pendanaan.

Keunikan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang menyoroti dampak finansial dari penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar dengan melibatkan perspektif beragam: kepala sekolah, guru, dan wali murid. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek pedagogis, manajerial, atau kesiapan tenaga pendidik tanpa secara khusus menautkan hal tersebut dengan beban biaya pendidikan.

Dengan melihat keterkaitan langsung antara praktik kurikulum, beban biaya yang muncul, serta strategi adaptasi yang dijalankan baik oleh sekolah maupun orang tua, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang dinamika pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Fokus ini sekaligus memperluas diskusi akademik yang selama ini jarang menempatkan dimensi keuangan sebagai variabel utama dalam keberlanjutan kurikulum. Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu memahami secara mendalam bagaimana Kurikulum Merdeka diterapkan serta bagaimana implikasinya terhadap biaya pendidikan di SD Tulus Bakti Palembang. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman, pandangan, dan interpretasi para informan secara rinci sehingga gambaran yang diperoleh lebih menyeluruh.

Subjek penelitian melibatkan tiga kelompok utama: kepala sekolah, guru, dan wali murid. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu memilih partisipan yang dianggap paling memahami dan memiliki pengalaman langsung terkait implementasi Kurikulum Merdeka. Kepala sekolah dipandang sebagai pengambil kebijakan internal, guru sebagai pelaksana kurikulum di kelas, sementara wali murid dilibatkan karena merasakan langsung dampak finansial dari kebijakan tersebut. Jumlah informan ditentukan secara proporsional hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh (*saturation point*).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur. Pedoman wawancara disusun untuk menggali aspek pelaksanaan kurikulum, kendala yang dihadapi, strategi penyesuaian yang dilakukan, hingga beban biaya yang muncul dari sudut pandang masing-masing pihak.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengikuti tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dari hasil wawancara, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dengan cara mengidentifikasi pola atau kecenderungan dari jawaban para informan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi baik dari sisi sumber maupun metode. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell, 2018; Moleong, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari hasil wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, dan wali murid di SD Tulus Bakti Palembang, ditemukan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka berdampak pada munculnya biaya tambahan di luar SPP yang biasanya dibayarkan. Kepala sekolah menegaskan bahwa biaya tersebut terutama dialokasikan untuk menyediakan alat praktik dan bahan proyek yang menjadi ciri khas pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. Menurut kepala sekolah, kebutuhan sarana ini memang merupakan konsekuensi logis dari model pembelajaran kontekstual yang menekankan pengalaman langsung.

Dalam wawancara, kepala sekolah menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka membuka peluang besar bagi sekolah untuk berinovasi, namun konsekuensinya adalah penyesuaian pada sisi pembiayaan. Ia mengatakan,

“Kurikulum Merdeka memberi kami ruang untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran. Tetapi memang, ada kebutuhan anggaran tambahan, terutama untuk alat praktik dan kegiatan proyek siswa. Tantangannya bagi kami adalah bagaimana mengatur anggaran agar tetap seimbang antara inovasi dan kemampuan finansial sekolah maupun orang tua.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pihak sekolah memandang Kurikulum Merdeka tidak sekadar sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai peluang transformasi pembelajaran. Namun, pada saat yang sama, kepala sekolah juga menekankan perlunya strategi manajemen keuangan yang tepat agar tambahan biaya tidak menjadi beban berlebihan.

Guru juga menilai tambahan biaya yang muncul masih sejalan dengan tujuan pendidikan. Ia menjelaskan bahwa penggunaan alat dan bahan praktik membuat proses belajar jauh lebih hidup karena siswa tidak hanya menerima teori, tetapi juga berkesempatan mengalaminya secara nyata. Seperti yang diungkapkan salah seorang guru,

“ Dengan adanya proyek dari kurikulum merdeka ini anak-anak merasa tertantang dan kreativitas anak-anak bertambah salah satu contohnya pelajaran Tari dan Drama anak-anak lebih bisa mengeskpresikan diri mereka. Memang ada biaya tambahan tapi manfaatnya untuk anak jauh lebih besar.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum ini tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga membuka ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi non-akademik. Pernyataan ini menegaskan bahwa biaya tambahan yang muncul dipersepsikan bukan sebagai beban semata, melainkan sebagai investasi yang menghasilkan pengalaman belajar yang lebih variatif, menyenangkan, dan relevan dengan pengembangan karakter anak

Sementara itu, wali murid juga mengakui adanya biaya tambahan, misalnya untuk membeli bahan praktik atau mendukung kegiatan proyek. Namun, mereka menilai biaya tersebut masih tergolong wajar dan sebanding dengan manfaat yang diterima anak. Seorang wali murid menyampaikan,

“Memang ada keluar biaya tetapi sejauh ini biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Dan saya lihat anak saya lebih semangat belajar dan dengan adanya kurikulum merdeka sangat berdampak bagi anak saya. Jadi bagi saya, uang yang keluar sangat sebanding dengan manfaat yang di dapat.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa biaya tambahan tidak dianggap sebagai hambatan utama, melainkan sebagai bentuk pengorbanan yang wajar demi perkembangan anak. Analisis ini juga menegaskan bahwa orang tua melihat nilai tambah dari Kurikulum Merdeka, khususnya dalam meningkatkan motivasi belajar dan membentuk pengalaman pendidikan yang lebih bermakna

Secara keseluruhan, baik kepala sekolah, guru, maupun wali murid sepakat bahwa tambahan biaya merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, tambahan itu dianggap masih bisa diterima karena memberikan dampak positif terhadap perkembangan siswa

Pembahasan

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di SD Tulus Bakti Palembang tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi finansial. Tambahan biaya muncul sebagai dampak langsung dari model pembelajaran berbasis proyek yang menuntut penyediaan sarana, media, dan bahan praktik yang lebih variatif. Kurikulum tidak hanya berhubungan dengan penyusunan materi ajar, tetapi juga memerlukan kesiapan sumber daya serta dukungan anggaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, biaya tambahan dapat dipandang sebagai bentuk investasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Pandangan guru yang menyatakan bahwa biaya tambahan justru memperkaya pengalaman belajar siswa menguatkan temuan Yusa dkk. (2023) yang menekankan pentingnya dukungan fasilitas dalam pembelajaran berbasis proyek. Salah satu guru bahkan menegaskan, *“Dengan adanya proyek dari Kurikulum Merdeka ini anak-anak merasa tertantang dan kreativitas anak-anak bertambah. Salah satunya dalam pelajaran Tari dan Drama, anak-anak lebih bisa mengekspresikan diri mereka. Memang ada biaya tambahan, tapi manfaatnya untuk anak jauh lebih besar.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa tambahan biaya tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kontekstual, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik.

Dari perspektif orang tua, tambahan biaya juga dinilai masih dalam batas wajar. Salah seorang wali murid menyampaikan, *“Memang ada keluar biaya tetapi sejauh ini biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Dan saya lihat anak saya lebih semangat belajar dan dengan adanya Kurikulum Merdeka sangat berdampak bagi anak saya. Jadi bagi saya, uang yang keluar sangat sebanding dengan manfaat yang didapat.”* Pernyataan ini memperlihatkan bahwa orang tua memandang biaya tambahan sebagai pengeluaran yang seimbang dengan manfaat, terutama karena mereka melihat adanya peningkatan motivasi belajar serta perkembangan keterampilan anak. Hal ini sejalan

dengan penelitian Marwah dkk. (2022) yang menegaskan bahwa peran orang tua dalam Kurikulum Merdeka tidak hanya berupa dukungan moral, tetapi juga kontribusi finansial.

Selain persoalan biaya, penelitian ini juga menyingkap adanya tantangan lain yang bersifat tidak langsung atau sering disebut *hidden cost*, seperti kebutuhan perangkat digital, akses internet, serta waktu tambahan yang harus diluangkan orang tua untuk mendampingi anak belajar di rumah. Faktor-faktor ini berpotensi menimbulkan kesenjangan, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Jika tidak ditangani secara bijak, *hidden cost* dapat memperlebar ketidaksetaraan akses pendidikan.

Di sisi lain, literatur lain juga menegaskan pentingnya faktor non-finansial dalam keberhasilan kurikulum. Diva dkk. (2025) menunjukkan bahwa profesionalisme guru, khususnya yang telah tersertifikasi, menjadi faktor kunci dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini dipertegas oleh Amirudin (2023) yang menekankan bahwa kepemimpinan sekolah sangat menentukan arah kebijakan dan kesiapan institusi dalam menghadapi konsekuensi dari kurikulum baru, termasuk soal pengelolaan biaya tambahan.

Lebih jauh lagi, Lewis, Khotima, Abdurrahmansyah, dan Handayani (2024) menegaskan bahwa lembaga pendidikan, termasuk sekolah dasar, perlu beradaptasi dengan tuntutan sosial dan ekonomi agar tetap relevan. Hal ini tampak nyata dalam implementasi Kurikulum Merdeka, di mana sekolah berupaya menyeimbangkan antara tuntutan pedagogis dan kemampuan finansial orang tua murid.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka membawa dampak ganda: di satu sisi meningkatkan kualitas pembelajaran, kreativitas, serta motivasi siswa, tetapi di sisi lain memunculkan konsekuensi finansial yang tidak kecil. Biaya tambahan yang muncul perlu dipahami sebagai investasi pendidikan yang memberi manfaat jangka panjang. Namun, agar kurikulum ini berkelanjutan, dibutuhkan strategi kolaboratif yang melibatkan sekolah, orang tua, serta dukungan kebijakan dari pemerintah. Hanya dengan cara inilah beban finansial dapat dikelola secara adil tanpa mengurangi esensi dari Kurikulum Merdeka sebagai upaya mencetak generasi yang kreatif, mandiri, dan relevan dengan tantangan zaman.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian mengenai praktik Kurikulum Merdeka di SD Tulus Bakti Palembang menunjukkan bahwa kebijakan ini membawa dampak positif terhadap kualitas pembelajaran, meskipun diikuti dengan konsekuensi finansial yang nyata. Kepala sekolah melihat Kurikulum Merdeka sebagai ruang inovasi yang dapat memperkaya pengalaman belajar, namun pada saat yang sama menuntut penyesuaian dalam pengelolaan anggaran. Guru menilai adanya biaya tambahan justru mendorong pembelajaran menjadi lebih kreatif, kontekstual, dan bermakna bagi siswa. Sementara itu, wali murid memandang pengeluaran tambahan masih dalam kategori wajar dan sebanding dengan manfaat yang diperoleh, terutama karena anak terlihat lebih bersemangat, percaya diri, dan mampu mengekspresikan diri melalui berbagai proyek

Selain biaya langsung yang dikeluarkan, penelitian ini juga mengungkap adanya hidden cost, seperti kebutuhan internet, perangkat digital, dan waktu tambahan orang tua untuk mendampingi anak belajar di rumah. Faktor ini berpotensi menimbulkan kesenjangan akses pendidikan jika tidak diantisipasi. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada kesiapan sekolah dan profesionalisme guru, tetapi juga pada sinergi dengan orang tua serta dukungan kebijakan pemerintah untuk memastikan keberlanjutannya.

Kurikulum Merdeka dapat dipandang sebagai investasi pendidikan yang berharga. Meskipun memunculkan konsekuensi biaya, manfaat yang diberikan dalam membentuk generasi kreatif, mandiri, dan relevan dengan tuntutan zaman jauh lebih besar. Agar pelaksanaannya berkelanjutan, diperlukan strategi kolaboratif yang adil antara sekolah, orang tua, dan pemerintah sehingga beban finansial tidak menjadi penghalang bagi tujuan utama pendidikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam mendukung keberlanjutan penerapan Kurikulum Merdeka. Sekolah perlu merancang strategi manajemen keuangan yang efisien dan transparan agar tambahan biaya dapat dioptimalkan untuk peningkatan mutu pembelajaran tanpa membebani orang tua secara berlebihan. Guru disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi profesional melalui pelatihan berkelanjutan agar dapat mengelola pembelajaran berbasis proyek dengan sumber daya yang ada secara kreatif dan efektif. Pemerintah juga perlu menyediakan dukungan kebijakan dan pendanaan yang memadai, terutama untuk mengurangi kesenjangan akibat biaya tersembunyi (hidden cost) seperti kebutuhan perangkat digital dan akses internet. Dengan sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan, implementasi Kurikulum Merdeka dapat berlangsung secara berkelanjutan, adil, dan mampu menghasilkan generasi yang mandiri, kreatif, serta relevan dengan tuntutan zaman

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmansyah, Amin, & Fauzi. (2024). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama melalui Hidden Curriculum. *Jurnal Fikrotuna*, 15(1), 45–60.
- Abdurrahmansyah, dkk. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar/Kampus Merdeka (MBKM) Perspektif perguruan tinggi islam. UIN Raden Fatah Press.
- Amin, M., dkk. (2023). Transformasi Digital dalam Pendidikan Islam: Tantangan dan Peluang. *Al-Adabiyah Jurnal Pendidikan Islam*, 18(1), 89–104
- Amirudin, M. F. (2023). Respons Pimpinan PTKIS terhadap Kebijakan Pendidikan Islam di Sumatera. *Jurnal Edukasi Islam*, 5(2), 221–236.
- Diva, A. M., dkk. (2025). Sertifikasi Guru dan Dampaknya terhadap Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pedagogik*, 12(1), 34–47.
- Lewis, Khotima, Abdurrahmansyah, & Handayani. (2024). Pengembangan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. *Jurnal Pendas*, 15(2), 101–115.
- Marwah, S., Lestari, D., & Fitriana, A. (2022). Peran orang tua dalam implementasi Kurikulum Merdeka: Studi pada sekolah dasar di Jawa Tengah. *Jurnal*

- Pendidikan Dasar Nusantara, 8(2), 101-112.
- Sari, R. (2022). Konstruktivisme dalam pembelajaran berbasis proyek pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(1), 45-56.
- Suryana, E., dkk. (2021). Analisis Kinerja Mahasiswa Peserta Micro Teaching di UIN Raden Fatah Palembang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 55-68.
- Yusa, I. G. N., Hartati, S., & Pramana, K. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka dan tantangannya terhadap pembiayaan pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 13(1), 77-89